

**PRIVATISASI BUMN PERSPEKTIF UU NO. 19 TH. 2003 TENTANG BUMN
DAN DOKTRIN EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Oleh :

**IN'AMUL MUSHOFFA
NIM. 08220065**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2012**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PRIVATISASI BUMN PERSPEKTIF UU NO.19 TH. 2003 TENTANG BUMN DAN DOKTRIN EKONOMI ISLAM

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data dari orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh, secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 2 Oktober 2012

Penulis

In'amul Mushoffa
NIM. 08220065

HALAMAN PERSETUJUAN

Dosen pembimbing penulisan karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi saudara In'amul Mushoffa, NIM 08220065, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati, dan mengoreksi berbagai data yang tertuang di dalam proposal skripsi. Maka skripsi dengan judul:

PRIVATISASI BUMN PERSPEKTIF UU NO.19 TH. 2003 TENTANG BUMN DAN DOKTRIN EKONOMI ISLAM

telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah yang telah ditentukan, untuk disetujui dan diajukan kepada dewan majelis penguji.

Malang, 1 Oktober 2012

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syari'ah

Dosen Pembimbing,

Dr. Suwandi. M.H.
NIP. 1961104152000031001

Dra. Jundiani S.H., M.Hum.
NIP. 1965091999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara In'amul Mushoffa, NIM 08220065, mahasiswa Hukum Bisnis Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Mallik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRIVATISASI BUMN PERSPEKTIF UU NO.19 TH. 2003 TENTANG BUMN DAN DOKTRIN EKONOMI ISLAM

Telah dinyatakan lulus dengan nilai B+ (Sangat Baik)

Dewan Penguji:

1. Musleh Herry, SH.MHum. (_____)
NIP. 196807101999031002 Penguji Utama

2. Drs. M. Nur Yasin, M.Ag. (_____)
NIP. 1969102419950310031 Ketua

3. Dra. Jundiani, SH.MHum. (_____)
NIP. 1965091999032001 Sekretaris

Malang, 1 Oktober 2012
Dekan,

Dr.Hj.Tutik Hamidah,M.Ag
NIP: 195904231986032003

MOTTO

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.....” (QS: AL-Hasyr: 7)

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ تَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“... kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakanapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu....” (Al-Maidah: 17)

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api”. (HR Ahmad dan Abu Dawud)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Alamin,

Puji syukur kehadiran *Ilahi Rabby*, atas anugerah berfikir dan energi yang diberi-Nya dalam menjalankan amanah kehidupan, termasuk penyelesaian skripsi ini. Sholawat serta salam-Nya, semoga tetap tercurah kepada pemilik figuritas tanpa batas, Muhammad SAW. Atas kerja superkerasnya, Peradaban Islam mewarnai dinamika dunia. Nikmat *Iman, Islam, dan Ihsan* dapat selalu bisa dicari bagi mereka yang menginginkannya, sampai kiamat nanti.

Skripsi dengan judul ***Privatisasi BUMN Perspektif UU No.19 Th. 2003 Tentang BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam*** ini tidak mungkin ada tanpa bantuan kooperatif elemen-elemen penting, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari suprastruktur maupun infrastruktur di Kampus tercinta, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, Rektor UIN Maliki Malang;
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah M,Ag, Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang;
3. Pembantu Dekan I, Dr. Umi Sumbulah M.Ag, Pembantu Dekan II, Dr. Fauzan Zenrif M.Ag, dan Pembantu Dekan III Fakultas Syari'ah Dr. Roibin M.Hi;
4. Dr. Suwandi MH, Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah dan Drs.M.Nur Yasin M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah
5. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum., Selaku Pembimbing skripsi penulis.

6. Ahmad Wahidi, SHi, M.Hi, selaku pembimbing akademik;
7. Segenap dosen di Fakultas Syari'ah.;
8. Kedua orang tua penulis, Ahmad Yusuf Aruqot dan Chayatin.
9. Kakak-kakak penulis: Tsaniyatul Masruroh, Nanang Chumaidi, Ida Aini Loetfiyah;
10. Kawan-kawan aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syari'ah-Ekonomi UIN Malang, Baburrachman 'Zizou', Sang Intelektual Muda; Anwar Fauzi, Dzikri AM; Dani, Tutik, Hably, Aish, Hatta, Rohmah, Nur, Binar, Fitri, dan sederet nama kader-kader luar biasa yang harapanku pada kalian tidak cukup disebutkan hanya dalam kata-kata. Pegiat aktivisme HMI UIN Malang, Awink, Holilurrohman, Suhaimi, Iroel Ar, *Special thank's to* kakanda-ayunda, Bang Sony, Bang Anas, Bang Mukhid Bang Ruslan, Yunda Rochmah dan semuanya.
11. Para pejuang kemanusiaan di Malang Corruption Wacth (MCW) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Kantor Perwakilan Malang serta Pegiat aktivisme di PMII, IMM, HTI, KAMMI, GMNI dan sebagainya.
12. Rekan-rekan di 'Santri Foundation', Ikatan Santri-Alumni PPRM Zona Pasuruan (ISAP).
13. Semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini dan selama penulis berproses di UIN Maliki Malang.

Malang, 31 Agustus 2012

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Definisi Konseptual	11
G. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Bahan Hukum	14
a. Bahan Hukum Primer	14
b. Bahan Hukum Sekunder	14
c. Bahan Hukum Tersier	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Metode Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Metode Pengelolaan Bahan Hukum	17
7. Sistematika Penelitian	17
BAB II : PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA.....	19
A. Penelitian Terdahulu	19
B. Privatisasi Secara Umum.....	24
1. Definisi Privatisasi	24
2. Sejarah Privatisasi dan Latar Belakang	26
3. Pro dan Kontra Terhadap Privatisasi	31
C. Privatisasi BUMN di Indonesia	33
1. Pengertian Privatisasi BUMN	33
2. Status Keuangan BUMN	34
3. Dasar Hukum Privatisasi BUMN.....	35
4. Maksud dan Tujuan Privatisasi BUMN.....	38
5. Prinsip Privatisasi BUMN	43
6. Kriteria Perusahaan Yang dapat Di Privatisasi	43
7. Metode Privatisasi BUMN	45

8. BUMN Yang Diprivatisasi	49
BAB III: KONSEP KEPEMILIKAN/HAK MILIK DAN PERAN NEGARA DALAM DOKTRIN EKONOMI ISLAM	55
A. Konsep Kepemilikan/Hak Milik Dalam Ekonomi Islam	51
1. Definisi Kepemilikan	51
2. Hakikat Kepemilikan	53
3. Macam-Macam Kepemilikan	54
a. Kepemilikan Pribadi (<i>al-milkiyah al-fardliyah</i>)	55
b. Kepemilikan Umum/Publik (<i>al-milkiyah al-'ammah</i>).....	56
1) Fasilitas atau sarana umum.	56
2) Bahan tambang	59
3) Sumber daya alam yang bentukan materinya sulit Dimiliki individu	65
c. Kepemilikan Negara (<i>milkiyah al-daulah</i>)	66
B. Peran Negara Dalam Ekonomi Islam	68
BAB IV : KOMPARASI PRIVATISASI BUMN MENURUT UU NO.19 TH. 2003 TENTANG BUMN DAN DOKTRIN EKONOMI ISLAM.....	79
A. Pengaturan Privatisasi BUMN Perspektif UU No.19 Th. 2003 Tentang BUMN	75
B. Kebijakan Privatisasi BUMN Perspektif Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Islam	80
1. Privatisasi BUMN Persero Kategori Fasilitas Umum	87
2. Privatisasi BUMN Persero Kategori Pertambangan	89
3. Privatisasi Perusahaan Yang Boleh Dimiliki Individu, Tetapi Ditetapkan Pemerintah Sebagai BUMN	92
4. Privatisasi Perusahaan Publik Secara Umum	92
C. Komparasi Hukum Privatisasi BUMN antara UU No.19 Th. 2003 Tentang BUMN Indonesia dan Doktrin Ekonomi Islam	94
BAB IV : PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1: Ketimpangan Distribusi Pendapatan Tahun 2005	7
2. Tabel 2: Tabulasi Penelitian Terdahulu	23
3. Tabel 3: Tabulasi Konsep Kepemilikan Menurut Doktrin Ekonomi Islam.....	84
4. Tabel 4: Kategorisasi BUMN Persero Berdasarkan Konsep Kepemilikan Perspektif Fiqh.....	87
5. Tabel 5: Konsep Kepemilikan Fiqh Mengenai Pertambangan	91
6. Tabel 6: Hukum Privatisasi Yang Dilarang Menurut Konsep Kepemilikan Perspektif Fiqh.....	93

PEDOMAN TRANSLITERASI¹

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (Koma menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulid dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan berikut:

¹Fakultas Syari'ah UIN Malang, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Malang: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang, 2011),

Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = Î, misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' Marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *al-riṣalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh *al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huuf kecil, kecuali terletak pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat disandakan (*idhafah*), maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amin Raîs”, dan bukan “shalât”.

ABSTRAK

Mushoffa, In'amul, 08220065, 2012, *Privatisasi BUMN Perspektif UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: *Privatisasi, BUMN, Doktrin Ekonomi Islam*

Sebagai program pengalihan aset dari milik negara menjadi milik swasta, Privatisasi BUMN di Indonesia merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang sangat kontroversial karena disinyalir berpotensi merugikan negara dalam jangka panjang. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN (UU BUMN) memuat pengaturan terkait Privatisasi yang meliputi maksud, tujuan, tata cara, kriteria BUMN yang bisa atau tidak bisa diprivatisasi, serta mengatur terkait peraturan teknis lainnya. Penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan privatisasi BUMN dalam UU BUMN dan bagaimana hukum privatisasi BUMN perpektif konsep kepemilikan dan peran negara dalam perekonomian perspektif doktrin ekonomi Islam. Selanjutnya, akan dikaji apakah persamaan dan perbedaan antara hukum privatisasi BUMN perspektif UU BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam. Penelitian kualitatif ini melakukan penggalian bahan hukum melalui studi pustaka (*library research*) terhadap Undang-undang BUMN, buku-buku terkait privatisasi BUMN, dan konsep kepemilikan dan peran negara dalam doktrin ekonomi Islam.

Tidak semua BUMN dapat diprivatisasi, baik menurut UU BUMN dan Doktrin Ekonomi Islam. Hanya saja, spesifikasinya berbeda. BUMN yang dapat diprivatisasi dalam UU BUMN hanyalah BUMN Persero yang memenuhi kriteria dalam Pasal 76 UU BUMN, sedangkan BUMN yang tidak boleh diprivatisasi adalah BUMN yang dilarang sebagaimana dalam Pasal 77 UU BUMN.

Doktrin Ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga jenis, yakni kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan pribadi. Negara harus berperan sebagai pengelola untuk menjamin kebutuhan masyarakat, terutama aset yang seharusnya menjadi kepemilikan umum. Kepemilikan umum berarti milik seluruh masyarakat. Berpedoman pada sebuah kaidah fiqhiyah, bahwa status hukum industri mengikuti apa yang diproduksinya. Maka, BUMN yang memproduksi barang yang tergolong milik umum/seluruh masyarakat tidak boleh diprivatisasi karena akan dimiliki oleh segelintir pihak pemilik saham. Hal ini meliputi perusahaan pertambangan dan fasilitas umum. Dalam konteks pertambangan, kedua sumber hukum tersebut sama-sama melarang adanya privatisasi. Privatisasi pertambangan atau sumber daya alam tidak diperbolehkan dalam Pasal 76 UU BUMN. Hal ini untuk melindungi keadilan distribusi kepemilikan terhadap aset milik masyarakat yang seharusnya dikelola negara. Begitu juga dengan privatisasi aset strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak juga tidak diperbolehkan. Dalam Islam, untuk kategori yang terakhir ini termasuk dalam fasilitas umum yang menjadi kepemilikan umum. Konsekuensinya, perusahaan sektor ini tidak boleh diprivatisasi.

ABSTRACT

Mushoffa, In'amul, 08220065, 2012, Privatization of State-Owned Enterprises Act Perspectives No. 19 of 2003 on state and Islamic Economic Doctrine, Thesis, Departement of Bussines Law of Syaria, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Lector: Dra. Jundiani, SH, M. Hum.

Keywords: privatization, BUMN, Islamic Economic Doctrine.

As a diversion program of state-owned assets into private property, privatization of state-owned enterprises in Indonesia is the government's economic policies which are highly controversial because it allegedly could potentially harm the country in the long time. Law No. 19 Year 2003 on BUMN (BUMN Act) contains settings which are related to privatization include the intent, purpose, procedures, criteria or state that can not be privatized, and organizes relevant technical regulations. This study examines how the regulations of BUMN privatization in the law and how the privatization law concept of ownership perspective and the perspective of the economic role of the state in the doctrine of Islamic economy. Furthermore, it will be assessed whether the similarities and differences between the laws of perspective privatization BUMN and the doctrine of Islamic economy. This qualitative study was digging through library of legal materials of state law, books of privatization of BUMN, and the concept of ownership and the role of the state in the doctrine of Islamic economy.

Not all BUMN to be privatized, according to both state law and the doctrine of economic Islam. It's just different its specification. BUMN that can be privatized under state law is Persero of BUMN that meet the criteria in Article 76 of the BUMN regulations, while BUMN that cannot be privatized is BUMN that are prohibited by state law in Article 77.

Doctrine of islamic economy break the ownership into three types, namely state ownership, public ownership and private ownership. State must act as a manager to ensure the needs of the society, especially the asset that should be public ownership. Public ownership means belonging to the whole of the society. Guided for the rule of fiqhiyah, that the legal status of the industry follows what is produced. Thus, BUMN that produces the goods belonging to the public domain or entire of the society should not be privatized because it is owned by a handful of shareholders. This includes mining companies and public facilities. In the context of mining, the two sources of law equally prohibits the privatization. The privatization of the mining or natural resources are not allowed in Article 76 of Law of BUMN. This is to protect the fairness of the distribution of ownership of assets belonging to the people that should be run by the country. And also the privatization of strategic assets dominate the life of the people are also not allowed. In Islam, for this last category is included in the public facility into public ownership. Consequently, this corporate sector should not be privatized.

مستخلص البحث

انعام المصفي، 08220065، 2012، خصخصة الشركات المملوكة للدولة وجهات نظر القانون رقم 19 لعام 2003 عن الشركات المملوكة للدولة والمذهب الاقتصادي الإسلامي، بحث العلمي، الشريعة الأعمال برنامج الدراسات القانونية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: جوندبياني الماجستير

كلمات المفتاحية: الخصخصة، الشركات المملوكة للدولة، المذهب الاقتصادي الإسلامي.

برنامج تحويل الأصول المملوكة للدولة إلى الملكية الخاصة، وخصخصة الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا سياسة الحكومة الاقتصادية مثيرة للجدل للغاية لأنها يمكن أن تضر يزعم يحتل البلاد على المدى الطويل. القانون رقم 19 سنة 2003 عن الشركات المملوكة للدولة (الشركات المملوكة للدولة القانون) يحتوي على إعدادات المتعلقة بالخصخصة يعني القصد والغرض والإجراءات والمعايير أو الدولة التي لا يمكن خصصتها، وتنظيم القواعد الفنية ذات الصلة. هذا البحث تبحث عن كيفية تنظيم الخصخصة في الشركات المملوكة للدولة القانون وكيف أن فكرة قانون الخصخصة من منظور الملكية ومنظور الدور الاقتصادي للدولة في العقيدة الاقتصادي الإسلامي. ولذلك، سيبحث تقييم ما أوجه الشبه والاختلاف بين قوانين الخصخصة منظور الشركات المملوكة للدولة القانون والاقتصاد من العقيدة الإسلامية. هذا البحث الكيفي يعمل من خلال حفر مكتبة للمواد القانونية لدولة القانون، والكتب التي تتعلق بخصخصة الشركات المملوكة للدولة، ومفهوم الملكية، ودور الدولة في المذهب الاقتصادي الإسلام. لا يستطيع كله أن تخ خصصة الشركات المملوكة للدولة، وفقا لقانون الولاية على حد سواء وعقيدة الإسلام الاقتصادي. ولكن خصائصها مختلفة. الشركات المملوكة للدولة التي تستطيع أن تخصخصة في الشركات المملوكة للدولة القانون هي الشركات المملوكة الدولة الشركات التي تملك بالمعايير الواردة في المادة 76 من قانون الشركات المملوكة للدولة، والشركات المملوكة الدولة التي لا يباح أن تخصخصة هي الشركات المملوكة للدولة التي يحظرها القانون في المادة (77) دولة.

عقيدة الإسلام الاقتصادي يقسم على الملكية إلى ثلاثة أنواع، وهي ملكية الدولة والملكية العامة والملكية الخاصة. تعمل الدولة كمدير لضمان احتياجات المجتمع، وخاصة الأصول التي تكون الملكية العامة. الملكية العامة تنتمي للمجتمع ككل. يتأسس على القاعدة الفقهية أن الوضع القانوني للصناعة تتبع ما ينتج. وبالتالي، لا ينبغي الشركات المملوكة للدولة التي تنتج السلع ينتمون إلى المجال العام / المجتمع بأكمله تخضع للخصخصة لأن يملك عدد قليل من المساهمين. وهذا يحول شركات التعدين والمرافق العامة. في سياق التعدين، وا لثاني من مصادر القانون ينهي على الخصخصة. لا يباح للخصخصة الموارد الطبيعية أو التعدين في المادة 76 من قانون الشركات المملوكة للدولة. هذا لحماية نزاهة توزيع ملكية الأصول المملوكة للمجتمع الذي يجب أن يدير البلاد. كما خصخصة الأصول الاستراتيجية تحمي على حياة الناس غير مسموح به. في الإسلام، لهذه الفئة الأخيرة يتم تضمينها على مرفق عام في الملكية العامة. ونتيجة لها، لا ينبغي أن تخصخصة قطاع الشركات.